

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air selalu di posisikan sebagai kebutuhan dasar manusia dan strategi dalam dinamika hubungan internasional sumber daya air lintas batas memiliki dimensi yang melampaui aspek ekologis semata, karena turut merefleksikan distribusi kekuasaan dan ketimpangan struktur antarnegara. Sungai yang melintasi banyak negara sering menimbulkan masalah tentang pembagian, manajemen, dan pemanfaatan sumber daya air yang adil. Konflik Sungai Nil, yang melibatkan negara-negara di Afrika Timur dan Afrika Utara, terutama Mesir, Ethiopia, dan Sudan. Dalam dalam global political economy hal ini mendistribusikan kekuasaan antar negara dan kedua nya merasa memiliki hak antara hulu Nil Ethiopia dan hilir Mesir dan Sudan. Dalam hal ini dimana kepentingan negara hulu Ethiopia terhadap Sungai Nil sekitar 80% penyumbang air terutama Nil biru.

Perjanjian *Nile Waters Agreement 1959* antara Mesir dan Sudan menjadi dasar utama pengelolaan Sungai Nil selama beberapa dekade. Perjanjian ini mengalokasikan sebagian besar debit air Sungai Nil kepada Mesir dan Sudan tanpa melibatkan negara-negara hulu seperti Ethiopia. Selain itu, Mesir memperoleh posisi dominan dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan proyek di Sungai Nil melalui hak veto tidak resmi terhadap proyek yang dianggap dapat mengurangi aliran air ke wilayahnya. Kondisi ini kemudian memicu ketidakpuasan

negara-negara hulu dan menjadi konflik hidropolitik di kawasan Sungai Nil (Anindita & Nugraha, 2025).

Dengan panjang sekitar 6.650 kilometer, sungai Nil, salah satu sungai terpanjang di dunia, mengalir melalui sebelas negara di Afrika, termasuk Mesir, Ethiopia, dan Sudan. Ratusan juta orang yang tinggal di daerah sekitarnya bergantung pada air dari sungai ini sebagai sumber utama mereka. Sungai Nil adalah sumber air bersih utama bagi negara-negara hilir seperti Mesir dan Sudan, yang digunakan untuk keperluan domestik, pertanian, dan industri. Bahkan karena sebagian besar wilayah Mesir adalah gurun, negara sangat bergantung pada aliran Sungai Nil sebagai sumber kehidupan utamanya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 97% pasokan air tawar Mesir berasal dari Sungai Nil, yang digunakan terutama untuk pertanian dan kebutuhan rumah tangga orang Mesir oleh karena itu, stabilitas aliran Nil sangat penting untuk ketahanan air dan keamanan nasional Mesir (The Atlas Report, 2022).

Selain Mesir, Sudan juga sangat bergantung pada Sungai Nil untuk mendukung kegiatan pertanian dan penyediaan air bagi masyarakatnya. Sungai Nil tidak hanya menjadi sumber air tetapi juga memainkan peran penting dalam produksi energi dan pengendalian banjir melalui berbagai proyek bendungan di wilayah Sudan. Sementara itu, Ethiopia sebagai negara hulu memiliki posisi geografis yang strategis karena sebagian besar sumber air Sungai Nil berasal dari wilayahnya. Sekitar 85% aliran air Sungai Nil yang mencapai Sudan dan Mesir berasal dari Sungai Nil Biru yang bersumber di dataran tinggi Ethiopia. Kondisi ini memberikan Ethiopia potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya air tersebut

guna mendukung pembangunan ekonomi dan kebutuhan energi nasionalnya (Jeuland, Marc, et al. 2024).

Namun, pembagian air yang tidak adil selama bertahun-tahun menjadi masalah dalam manajemen Sungai Nil. Hal ini tidak terjadi meskipun ada perjanjian internasional di masa kolonial yang memberikan Mesir dan Sudan kendali atas air Sungai Nil. Perjanjian tahun 1929 antara Inggris dan Mesir memberikan Mesir hak veto atas proyek pembangunan di Sungai Nil yang dapat memengaruhi aliran air ke wilayahnya. Selanjutnya, perjanjian tahun 1959 antara Mesir dan Sudan menetapkan bahwa mereka akan membagi air Sungai Nil dengan sekitar 55 miliar meter kubik air per tahun kepada Mesir dan sekitar 18,5 miliar meter kubik kepada Sudan. Negara-negara hulu Sungai Nil seperti Ethiopia tidak terlibat dalam perjanjian, yang membuat mereka tidak senang dan mengkritik pembagian air Sungai Nil (Sharq Strategic Research, 2020).

Ketika Ethiopia memulai pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) pada tahun 2011 di Sungai Nil Biru, dekat perbatasan dengan Sudan, konflik tentang penggunaan Sungai Nil meningkat. Dengan kapasitas untuk menghasilkan lebih dari 5.000 Megawatt listrik, bendungan terbesar di Afrika ini akan memenuhi kebutuhan energi nasional Ethiopia dan mengekspornya ke negara-negara tetangga (Foreign Policy, 2025). Selain itu, bendungan ini dapat menampung sekitar 74 miliar meter kubik air, hampir sebanding dengan aliran tahunan Sungai Nil, Proyek ini dianggap oleh pemerintah Ethiopia sebagai simbol kebangkitan ekonomi negara dan langkah strategis untuk mengatasi kekurangan energi dan mendorong pembangunan industri (Science Africa, 2024).

Pada tahun 2011, Ethiopia sudah ada rencana untuk mengolah air Nil dengan mendirikan suatu bendungan namun Mesir menolak hal tersebut dengan permintaan Ethiopia, dengan dasar alasan yang kuat karena masa colonial yang di tandatangi pada tahun 1929 yang di buat oleh perdana Menteri Mesir dan komisasari Inggris untuk Mesir. Dengan kesepakatan yang terjadi mesir juga mengakui hak dari Sudan dalam jumlah air yang cukup untuk perkembangan sendiri bagian Mesir memiliki 48 miliar meter kubik sedangkan Sudan memiliki 4 miliar meter kubik, sehingga Mesir berhak memveto volume semua proyek yang berjalan di Sungai Nil termasuk wilayah hulu yang mempengaruhi segala Sungai Nil. Dengan itu salah satu dasar yang di lakukan Mesir untuk mencapai proyeknya dan kekuasaan nya di sungai Nil (Ananda, 2022:567).

Mesir menolak pembangunan GERD karena proyek tersebut dianggap melanggar perjanjian pembagian air Sungai Nil yang ditandatangani pada tahun 1929 dan 1959. Perjanjian tersebut memberikan hak historis yang besar kepada Mesir terhadap penggunaan air Sungai Nil serta hak veto terhadap proyek pembangunan di wilayah hulu yang berpotensi mengurangi aliran air ke Mesir. Ethiopia tidak mengakui legitimasi perjanjian tersebut karena tidak melibatkan negara-negara hulu Sungai Nil, termasuk Ethiopia sendiri. Selain faktor perjanjian historis, Mesir khawatir tentang proyek GERD karena kebutuhan air yang meningkat karena pertumbuhan penduduk, perubahan lingkungan, dan kemungkinan berkurangnya aliran air. Di sisi lain, Ethiopia melihat bendungan tersebut sebagai simbol kedaulatan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsanya dengan memanfaatkan sumber daya alamnya. Akibatnya, konflik

hidropolitik ini melibatkan banyak hal, bukan hanya masalah sumber daya air; itu juga melibatkan masalah politik, ekonomi, dan keamanan regional di Afrika Timur (Ananda, 2022:569).

PBB mengatakan bahwa negara-negara di Afrika Timur dan Afrika Utara sangat bergantung pada air Sungai Nil karena merupakan sumber daya air lintas batas yang penting bagi mereka. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB tahun 2021, utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Tanduk Afrika menyatakan bahwa negara-negara yang berbagi Sungai Nil memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut. Untuk mencapai kesepakatan, mereka harus bekerja sama dan bernegosiasi. PBB menekankan bahwa pengelolaan Sungai Nil harus dilakukan melalui dialog yang konstruktif dan berdasarkan prinsip penggunaan air secara adil dan berkelanjutan (United Nations Security Council, 2021).

PBB juga menekankan betapa pentingnya Sungai Nil bagi kehidupan orang-orang di daerah itu. Sungai Nil telah menyediakan air bersih, mendukung pertanian, dan memberi orang Mesir, Sudan, dan Ethiopia uang selama bertahun-tahun, menurut Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB. Akibatnya, setiap proyek pembangunan sungai yang signifikan, termasuk pembangunan bendungan, harus mempertimbangkan efeknya terhadap negara-negara di hilir Sungai berkelanjutan (United Nations Security Council, 2021).

Pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) di Sungai Nil Biru adalah salah satu masalah utama yang menjadi perhatian PBB. Memiliki kapasitas untuk menampung sekitar 74 miliar meter kubik air, bendungan ini dapat

berdampak besar pada aliran air menuju Sudan dan Mesir jika tidak dikelola dengan baik. PBB mengatakan bahwa inisiatif ini dapat membantu kerja sama regional jika dikelola dengan transparansi dan kesepakatan, tetapi jika dilakukan secara sepihak, itu dapat menimbulkan ketegangan.

Selain itu, dokumen resmi PBB menunjukkan bahwa Ethiopia mengisi bendungan GERD pertamanya pada tahun 2020 dengan sekitar 5 miliar meter kubik air. Pengisian ini menyebabkan penurunan sementara permukaan air Sungai Nil Biru, yang mengganggu pasokan air di Sudan dan bahkan mengganggu pasokan air minum di kota Khartoum selama beberapa hari. Ini meningkatkan kekhawatiran Mesir dan Sudan tentang konsekuensi pengisian bendungan (Digital Library, 2021).

Mesir mengatakan dalam forum Dewan Keamanan PBB bahwa pembangunan dan pengoperasian bendungan tanpa perjanjian dapat mengancam keamanan air lebih dari 100 juta orang Mesir yang bergantung pada Sungai Nil sebagai sumber utama mereka. Mesir menganggap Sungai Nil sebagai "urat nadi kehidupan" negara, dan setiap perubahan besar pada aliran air dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan sosial negara (United Nations Security Council, 2021).

Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa ketiga negara tersebut berusaha untuk mengembangkan kerja sama melalui penandatanganan Declaration of Principles (DoP) pada tahun 2015. Mesir, Sudan, dan Ethiopia setuju untuk menerapkan prinsip penggunaan air yang adil dan wajar serta berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui perundingan. Namun demikian, hingga saat ini masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan. Ini termasuk

metode untuk mengisi bendungan selama musim kemarau yang panjang dan sistem penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak pembangunan Dam Restorasi Besar Ethiopia pada tahun 2011, konflik di Sungai Nil antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan meningkat. Mesir menganggap Pembangunan bendungan sebagai ancaman bagi keamanan air nasional karena Sebagian besar kebutuhan air negara nya bergantung pada aliran Sungai Nil, sedangkan Sudan memiliki situasi yang lebih kompleks karena memperoleh manfaat dari pengendalian banjir dan pasokan energi, tetapi juga menghadapi bahaya dari pembangunan bendungan. Sebaliknya, Ethiopia melihat pembangunan bendungan sebagai proyek strategis nasional untuk meningkatkan kapasitas energinya dan mendorong pembangunan ekonomi.

Ketegangan politik dan diplomatik antara ketiga negara muncul sebagai akibat dari perbedaan kepentingan tersebut. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang mengikat mengenai mekanisme pengisian dan pengoperasian bendungan telah dicapai melalui berbagai mediasi internasional dan regional, termasuk Uni Afrika. Penelitian lebih lanjut diperlukan karena keadaan ini menunjukkan bahwa konflik Sungai Nil tidak hanya berkaitan dengan sumber daya air tetapi juga berkaitan dengan politik, keamanan, dan kerja sama regional. Oleh sebab itu, Penulis mengangkat rumusan masalah peneliti dalam pertanyaan **“Bagaimana Persepsi Media Daring Internasional terhadap Framing Konflik Sungai Nil antara Mesir, Ethiopia dan Sudan dalam Pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam*?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika resolusi konflik antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan dalam pembangunan Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) melalui pemberitaan media daring internasional. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana media internasional membingkai konflik GERD menggunakan fungsi framing Robert M. Entman yang meliputi *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgment*, dan *treatment recommendation*.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses resolusi konflik GERD berdasarkan teori Resolusi Konflik Johan Galtung yang mencakup konsep *negative peace*, *positive peace*, *structural violence*, dan *conflict transformation*. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara framing media dan dinamika Resolusi konflik yang terjadi antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan dalam sengketa pemanfaatan sumber daya air Sungai Nil terkait pembangunan GERD.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian tentang konflik yang terjadi dalam pemanfaatan air Sungai Nil antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan selama pembangunan *Grand Ethiopian Renaissance Dam* yang akan menghasilkan manfaat baik secara akademis maupun praktis. Manfaat ini berkaitan dengan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hubungan internasional, serta memberikan

pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana konflik sumber daya air lintas batas terjadi di seluruh dunia.

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian dalam bidang hubungan internasional, terutama yang berkaitan dengan diplomasi air internasional, konflik sumber daya alam, dan keamanan lingkungan. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik dengan masalah konflik lingkungan dan pengelolaan sumber daya air lintas batas. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan penelitian sebelumnya tentang perubahan dalam hubungan antara negara-negara Afrika Timur dan Afrika Utara dalam mengelola sumber daya air bersama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang posisi dan kepentingan masing-masing negara dalam konflik Sungai Nil, khususnya terkait pembangunan dan pengelolaan bendungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menunjukkan betapa pentingnya kerja sama regional, diplomasi, dan mekanisme negosiasi untuk menyelesaikan konflik sumber daya air lintas batas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara lain yang ingin melakukan hal yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan latar belakang penelitian dan menjelaskan konflik pemanfaatan sumber daya air Sungai Nil antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan yang dipicu oleh pembangunan Dam Renaissance Grand Ethiopia. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan, yang memberikan gambaran umum tentang susunan dan alur pembahasan penelitian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup tinjauan literatur sebelumnya tentang konflik sumber daya air lintas batas, khususnya yang berkaitan dengan Sungai Nil. Selain itu, bab ini mencakup kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep dalam penelitian berhubungan satu sama lain, dan hipotesis atau argumen utama penelitian. Dalam bagian metode penelitian, dijelaskan metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk menyelidiki konflik Sungai Nil antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan.

BAB III ANALISIS FRAMING MEDIA DAN DINAMIKA RESOLUSI KONFLIK GRAND ETHIOPIAN RENAISSANCE (DAM)

Bab ini membahas analisis framing media internasional terhadap konflik Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan, serta mengkaji dinamika resolusi konflik yang berkembang dalam pemberitaan. Analisis dilakukan dengan menggunakan model framing Robert Entman untuk mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan masalah, menjelaskan penyebab konflik, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi, serta menghubungkannya dengan konsep-konsep resolusi konflik.

BAB IV POLA FRAMING MEDIA DAN DINAMIKA RESOLUSI KONFLIK GARD ETHIOPIA RANAISSANCE DAM

Bab ini menjelaskan pola framing yang digunakan media internasional dalam memberitakan konflik Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan. Selain itu, bab ini menganalisis bagaimana konstruksi pemberitaan media memengaruhi pemahaman terhadap penyebab konflik, kepentingan para aktor, serta berbagai upaya resolusi konflik yang muncul dalam dinamika sengketa pengelolaan Sungai Nil. Analisis dilakukan berdasarkan model framing Robert Entman dan konsep resolusi

konflik untuk mengidentifikasi hubungan antara framing media dan arah penyelesaian konflik.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai pola framing media internasional dalam konflik Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) serta kaitannya dengan dinamika resolusi konflik antara Mesir, Ethiopia, dan Sudan. Pada bagian kesimpulan, peneliti merangkum temuan-temuan utama yang diperoleh dari analisis framing media menggunakan model Robert Entman, termasuk bagaimana media mendefinisikan masalah, mengidentifikasi penyebab konflik, memberikan penilaian moral, dan menawarkan rekomendasi penyelesaian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan implikasi temuan penelitian terhadap pemahaman mengenai peran media dalam membentuk persepsi publik dan memengaruhi proses resolusi konflik internasional. Pada bagian saran, peneliti memberikan rekomendasi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan media massa terkait pentingnya pemberitaan yang berimbang dalam konflik sumber daya lintas negara. Bab ini sekaligus menguraikan keterbatasan penelitian serta peluang pengembangan penelitian selanjutnya mengenai hubungan antara framing media dan resolusi konflik internasional.